

**RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNyasehingga terselesainya penyusunanRencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ini.

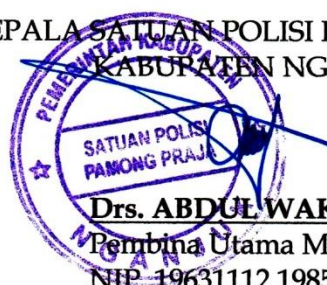
Rencana Strategis ini merupakan salah satu wujud perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang berisikan program dan kegiatan demi terwujudnya kabupooten Nganjuk yang aman, tentertam, tertib dan indah.

Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan terselesaikannya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiannya dan semoga dapat menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Nganjuk, 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NGANJUK



**Drs. ABDUL WAKID, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631112 198504 1 002

# DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>       |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1              |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 2              |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 5              |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 6              |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....</b>   | <b>7</b>       |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....   | 8              |
| 2.2 Sumber Daya .....  | 12             |
| 2.3 Kinerja Pelayanan .....  | 14             |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah.....              | 30             |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>                                    | <b>31</b>      |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi .....                    | 31             |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati<br>Terpilih .....         | 31             |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Satpol PP.....                            | 34             |
| 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis ..... | 35             |
| 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .....  | 36             |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>BAB IV</b>   | <b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                    | <b>38</b> |
| <b>BAB V</b>    | <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>           | <b>40</b> |
| <b>BAB VI</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>           | <b>41</b> |
| <b>BAB VII</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b> | <b>49</b> |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP .....</b>                               | <b>51</b> |

## **DAFTAR BAGAN**

|  |    |
|--|----|
| 1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja                     |    |
| Kabupaten Nganjuk.....   | 10 |
| 2. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran |    |
| Kabupaten Nganjuk.....   | 12 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| 1. Tabel II 3.1 Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.....                | 26 |
| 2. Tabel II 3.2 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan satuan polisi pamong praja kabupaten nganjuk ..... | 27 |
| 3. Tabel IV.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.....                              | 39 |
| 4. Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....   | 40 |
| 5. Tabel VI.1 Rencana Program dan Kegiatan .....  | 42 |
| 6. Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama.....   | 49 |
| 7. Tabel VII.2 Indikator Kinerja Kunci .....  | 49 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan Visi bupati dan wakil bupati yaitu mewujudkan kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat yang didukung dengan misi mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban. Untuk itu guna mewujudkan tatanan kehidupan tersebut perlu adanya kondisi daerah yang kondusif, aman, tertib, tentram dan nyaman yang didukung oleh berbagai program dan kegiatan dalam rencana strategis.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Nganjuk salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Berdasarkan hasil

pesta demokrasi tersebut pada tanggal 24 September 2018 Gubernur Jawa Timur melantik H. Novi Rakhman Hidayat, S.Sos, MM sebagai Bupati Nganjuk dan Dr. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA sebagai Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023.

Demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dengan periode 5 (lima) tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400 )
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 dan tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4421 )



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara nomor 5234 )
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 )
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal ; ( Lembaran Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72 dan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 632 )
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ( lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 nomor 12 Seri C )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E )
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 02 Seri E )
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9 )
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; ( Renstra Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 )

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk. ( Renstra Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 24 )

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

#### Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah.

#### Tujuan

Rencana Strategis disusun untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dituangkan dalam berbagai program diantaranya :

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
3. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dan ;
4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan kebakaran.

Dalam mewujudkan kabupaten Nganjuk yang aman, tenteram, tertib dan indah, didukung oleh tujuan dan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran;
2. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
3. Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran.

Tujuan dan sasaran yang didukung oleh berbagai indikator kinerja telah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun ditemui berbagai kendala yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, diantaranya :

1. Banyaknya pelanggaran perda dan masih adanya masalah sosial di masyarakat;
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berkaitan dengan pamswakarsa ;
3. Masih kurangnya reaksi cepat dalam penanganan kebakaran;
4. Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana.

## II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat yang terdiri dari
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan
3. 3 (tiga) bidang yaitu :
  - a. Bidang Penegakan Per Undang- Undangan yang terdiri dari :
    - Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan
    - Seksi Penyidikan dan Penindakan
  - b. Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat yang terdiri dari :
    - Seksi Ketertiban Umum
    - Seksi Operasional dan Pengendalian

c. Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari :

- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- Seksi Bina Potensi Masyarakat

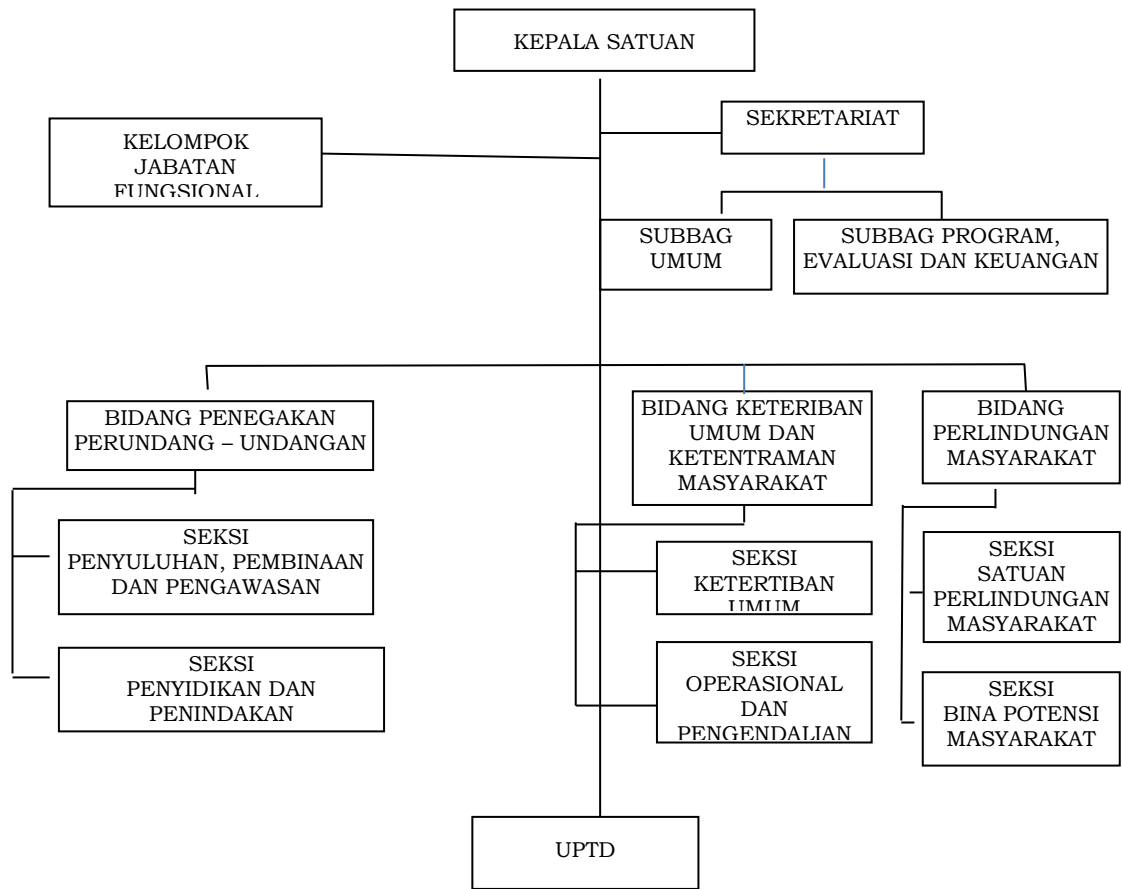
Sedangkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK**



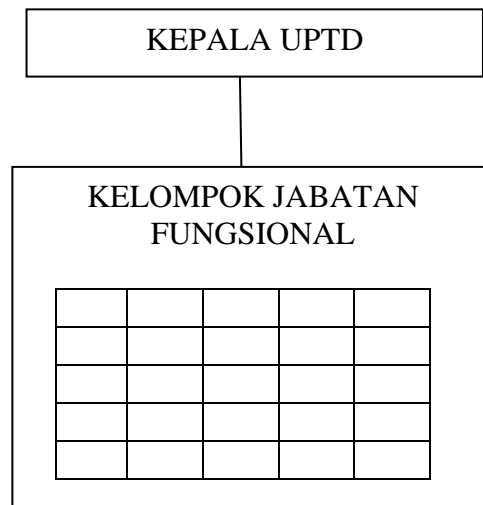


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk di tegaskan bahwa Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pemadam kebakaran. Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan perawatan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran;
2. Pelaksanaan pengadaan, perawatan peralatan kebakaran serta perlengkapan lainnya;
3. Pelaksanaan operasional penanggulangan adanya kebakaran;
4. pelaksanaan penyuluhan dan fasilitas terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
5. Pelaksanaan kegiatan ketrampilan pasukan pemadam kebakaran;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan kejadian kebakaran;
7. Pelaksanaan analisa, pengolahan dan pendokumentasian adanya kebakaran;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk merupakan Unit Pelaksana Teknis daerah Kelas B yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Susunan Organisasinya adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NGANJUK**



**II.2 Sumber Daya**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Adapun data pegawai Satuan Polisi Pamong Prajapada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai / personil

| No. | Uraian                        | Laki-Laki | Wanita | Jumlah |
|-----|-------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1.  | Pegawai Tetap (PNS)           | 69        | 5      | 74     |
| 2.  | Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) | 24        | 1      | 25     |
|     | Total                         | 93        | 6      | 99     |

Susunan Pegawai Berdasarkan Eselon

| Jabatan           | Eselon | Jumlah (orang) |
|-------------------|--------|----------------|
| Kepala Satuan     | II b   | 1              |
| Sekretaris        | III a  | -              |
| Kepala Bidang     | III b  | 3              |
| Kepala seksi      | IV a   | 5              |
| Kepala Sub Bagian | IV a   | 2              |

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Kepala UPT      | IV b | - |
| Fungsional Umum | -    | - |

Susunan Pegawai Berdasarkan pendidikan

| Pangkat / Gol             | S2 | S1 | SLTA | SLTP | SD |
|---------------------------|----|----|------|------|----|
| Pegawai Tetap             |    |    |      |      |    |
| Pembina Tingkat I/IV b    | 1  | -  | -    | -    | -  |
| Pembina / IV a            | 3  | -  | -    | -    | -  |
| Penata Tk I / III d       | 2  | 2  | -    | -    | -  |
| Penata / III c            |    | 4  | -    | -    | -  |
| Penata Muda Tk I / III b  | -  | -  | 1    | -    | -  |
| Penata Muda / III a       | -  | -  | 2    | -    | -  |
| Pengatur Tk. I / II d     | -  | -  | 3    | -    | -  |
| Pengatur / II c           | -  | -  | 38   | -    | -  |
| Pengatur Muda Tk I / II b | -  | -  | 4    | 2    | -  |

| Pangkat / Gol         | S2 | S1 | SLTA | SLTP | SD |
|-----------------------|----|----|------|------|----|
| Pengatur Muda / II a  | -  | -  | 6    | 1    | -  |
| Juru Tk I / I d       | -  | -  | -    | -    | -  |
| Juru / I c            | -  | -  | -    | 1    | 3  |
| Juru Muda Tk. I / I b | -  | -  | -    | -    | 1  |
|                       |    |    |      |      |    |
| Tenaga kontrak        | -  | 2  | 23   | -    | 1  |
| JUMLAH                | 6  | 8  | 77   | 4    | 4  |

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, diantaranya :

### Sarana dan prasarana pendukung

| No. | Jenis sarana   | Jumlah<br>(buah) |
|-----|--|------------------|
| 1.  | Mobil patroli  | 5                |
| 2.  | Mobil pemadam kebakaran  | 4                |
| 3.  | Kendaraan operasional roda dua   | 2                |
| 4.  | Sepeda pancal  | 4                |
| 5.  | HT   | 59               |
| 6.  | Pendirian papan larangan pengemis  | 10               |
| 7.  | Pendirian papan larangan pendirian bangunan liar (diatas aset tanah pemda) | 10               |
| 8.  | Pendirian papan larangan PKL   | 15               |
| 9.  | Pos penjagaan  | 3                |
| 10. | Pendirian water torn   | 3                |
| 11. | Kotak pengaduan  | 1                |

### II.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan wajib penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran adalah merupakan suatu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator :
  - a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas).
2. Penanggulangan bencana kebakaran dengan indikator :
  - a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran;
  - b. Tingkat waktu tanggap (reponse time rate)
  - c. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualitas; dan Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data penegakan peraturan daerah tahun 2014

| No. | Jenis penegakan                                    | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Gepeng, pengamen dan psikotik                      | 10     |            |
| 2.  | Pekerja Seks Komersial (PSK)                       | 6      |            |
| 3.  | Galian mineral non logam dan batuan                | 6      |            |
| 4.  | Penertiban reklame                                 | 4      |            |
| 5.  | Penertiban PKL                                     | 10     |            |
| 6.  | Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan                | 9      |            |
| 7.  | Penertiban bangunan liar                           | 0      |            |
| 8.  | Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus | 10     |            |

Data penegakan peraturan daerah tahun 2015

| No. | Jenis penegakan                                    | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Gepeng Pengamen dan Psikotik                       | 12     |            |
| 2.  | Pekerja Seks Komersial ( PSK )                     | 6      |            |
| 3.  | Galian Mineral Non Logam dan Bantuan               | 6      |            |
| 4.  | Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus | 10     |            |
| 5.  | Penertiban Reklame                                 | 27     |            |
| 6.  | Penertiban PKL                                     | 12     |            |
| 7.  | Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan                | 12     |            |
| 8.  | Penertiban bangunan liar                           | 8      |            |

Data penegakan peraturan daerah tahun 2016

| No. | Jenis penegakan                                    | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Gepeng Pengamen dan Psikotik                       | 13     |            |
| 2.  | Pekerja Seks Komersial ( PSK )                     | 12     |            |
| 3.  | Galian Mineral Non Logam dan Bantuan               | 8      |            |
| 4.  | Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus | 12     |            |
| 5.  | Penertiban Reklame                                 | 23     |            |
| 6.  | Penertiban PKL                                     | 10     |            |
| 7.  | Penertiban Bangunan Liar                           | 6      |            |
| 8.  | Penertiban IMB                                     | 6      |            |

Data penegakan peraturan daerah tahun 2017

| No. | Jenis penegakan                                    | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Gepeng Pengamen dan Psikotik                       | 15     |            |
| 2.  | Minuman Berakohol                                  | 8      |            |
| 3.  | Pekerja Seks Komersial ( PSK )                     | 8      |            |
| 4.  | Galian Mineral Non Logam dan Bantuan               | 8      |            |
| 5.  | Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus | 6      |            |

|    |                          |    |  |
|----|--------------------------|----|--|
| 6. | Penertiban Reklame       | 20 |  |
| 7. | Penertiban PKL           | 12 |  |
| 8. | Penertiban Bangunan Liar | 7  |  |
| 9. | Penertiban IMB           | 5  |  |

Data penegakan peraturan daerah tahun 2018

| No. | Jenis penegakan                                    | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Gepeng Pengamen dan Psikotik                       | 12     |            |
| 2.  | Minuman Berakohol                                  | 9      |            |
| 3.  | Pekerja Seks Komersial ( PSK )                     | 5      |            |
| 4.  | Galian Mineral Non Logam dan Bantuan               | 7      |            |
| 5.  | Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus | 7      |            |
| 6.  | Penertiban Reklame                                 | 28     |            |
| 7.  | Penertiban PKL                                     | 24     |            |
| 8.  | Penertiban Bangunan Liar                           | 11     |            |
| 9.  | Penertiban IMB                                     | 11     |            |

Berdasarkan laporan masyarakat masih ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran diantaranya :

1. Pendirian tower telekomunikasi di desa Patihan dan desa Ngepeh Kecamatan Loceret yang tidak berijin sehingga dilakukan penyegelan dan penutupan;
2. Pendirian selep daging di kelurahan Kartoharjo kecamatan Nganjuk. Selep daging tersebut ditutup sementara karena belum memiliki ijin pendiriannya sampai terbitnya ijin;
3. Pembongkaran rumah atau bangunan yang berda diatas bantaran sungai yang berda di Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;
4. Penertiban rumah kost-kostan yang berada di kecamatan Bagor, Kertosono dan Nganjuk.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Tahun 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja bahwa tugas pokok satpol pp adalah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.

Implementasi suatu regulasi daerah guna mewujudkan tatanan kehidupan yang dinamis menuntut adanya keseimbangan dan keselarasan semua elemen masyarakat. Dengan adanya implementasi berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, diharapkan terciptanya kondisi dinamis suatu daerah. Namun masih ditemui berbagai pelanggaran-pelanggaran baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah. Untuk itu guna peningkatan pendapatan asli daerah dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta keindahan perlu didukung oleh berbagai upaya-upaya diantaranya :

1. Sosialisasi peraturan daerah dan kepala daerah.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan terkait tugas pokok dan fungsi.
3. Penerapan sanksi bagi pelanggar.

Data patroli siaga tahun 2014 s/d 2018

| No. | Kegiatan        | Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|     |                 | 2014        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|     | Patroli wilayah | 36          | 35   | 130  | 156  | 34   |

Kegiatan patroli wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lapangan terkait dengan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pelanggaran peraturan daerah. Patroli wilayah semakin ditingkatkan guna menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2014

| No. | Kecamatan   | Jumlah RT | Jumlah Linmas |
|-----|-------------|-----------|---------------|
| 1.  | Nganjuk     |           | 434           |
| 2.  | Sukomoro    | 284       | 285           |
| 3.  | Bagor       | 532       | 139           |
| 4.  | Wilangan    | 168       | 213           |
| 5.  | Berbek      | 423       | 570           |
| 6.  | Loceret     | 457       | 500           |
| 7.  | Ngetos      | 216       | 253           |
| 8.  | Sawahan     | 342       | 221           |
| 9.  | Pace        | 538       | 430           |
| 10. | Prambon     | 435       | 434           |
| 11. | Tanjunganom | 685       | 450           |
| 12. | Kertosono   | 342       | 284           |
| 13. | Baron       | 289       | 356           |
| 14. | Ngronggot   | 396       | 330           |
| 15. | Patianrowo  | 283       | 320           |
| 16. | Lengkong    | 272       | 230           |
| 17. | Jatikalén   | 147       | 146           |
| 18. | Gondang     | 125       | 300           |
| 19. | Ngluyu      | 104       | 107           |
| 20. | Rejoso      | 437       | 376           |

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2015

| No. | Kecamatan   | Jumlah RT | Jumlah Linmas |
|-----|-------------|-----------|---------------|
| 1.  | Nganjuk     | 395       | 425           |
| 2.  | Sukomoro    | 284       | 300           |
| 3.  | Bagor       | 532       | 530           |
| 4.  | Wilangan    | 168       | 415           |
| 5.  | Berbek      | 423       | 570           |
| 6.  | Loceret     | 457       | 500           |
| 7.  | Ngetos      | 216       | 253           |
| 8.  | Sawahan     | 342       | 235           |
| 9.  | Pace        | 538       | 430           |
| 10. | Prambon     | 435       | 434           |
| 11. | Tanjunganom | 685       | 400           |
| 12. | Kertosono   | 342       | 280           |
| 13. | Baron       | 289       | 356           |
| 14. | Ngronggot   | 396       | 330           |
| 15. | Patianrowo  | 283       | 320           |
| 16. | Lengkong    | 272       | 230           |
| 17. | Jatikalen   | 147       | 155           |
| 18. | Gondang     | 125       | 300           |
| 19. | Ngluyu      | 104       | 130           |
| 20. | Rejoso      | 437       | 376           |

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2016

| No. | Kecamatan   | Jumlah RT | Jumlah Linmas |
|-----|-------------|-----------|---------------|
| 1.  | Nganjuk     | 395       | 425           |
| 2.  | Sukomoro    | 284       | 315           |
| 3.  | Bagor       | 532       | 530           |
| 4.  | Wilangan    | 168       | 415           |
| 5.  | Berbek      | 423       | 570           |
| 6.  | Loceret     | 457       | 500           |
| 7.  | Ngetos      | 216       | 253           |
| 8.  | Sawahan     | 342       | 235           |
| 9.  | Pace        | 538       | 430           |
| 10. | Prambon     | 435       | 434           |
| 11. | Tanjunganom | 685       | 400           |
| 12. | Kertosono   | 342       | 290           |
| 13. | Baron       | 289       | 356           |
| 14. | Ngronggot   | 396       | 335           |
| 15. | Patianrowo  | 283       | 325           |
| 16. | Lengkong    | 272       | 235           |
| 17. | Jatikalen   | 147       | 155           |
| 18. | Gondang     | 125       | 310           |
| 19. | Ngluyu      | 104       | 130           |
| 20. | Rejoso      | 437       | 376           |

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2017

| No. | Kecamatan   | Jumlah RT | Jumlah Linmas |
|-----|-------------|-----------|---------------|
| 1.  | Nganjuk     | 395       | 388           |
| 2.  | Sukomoro    | 284       | 374           |
| 3.  | Bagor       | 532       | 646           |
| 4.  | Wilangan    | 168       | 232           |
| 5.  | Berbek      | 423       | 589           |
| 6.  | Loceret     | 457       | 586           |
| 7.  | Ngetos      | 216       | 261           |
| 8.  | Sawahan     | 342       | 320           |
| 9.  | Pace        | 538       | 487           |
| 10. | Prambon     | 435       | 476           |
| 11. | Tanjunganom | 685       | 640           |
| 12. | Kertosono   | 342       | 139           |
| 13. | Baron       | 289       | 356           |
| 14. | Ngronggot   | 396       | 470           |
| 15. | Patianrowo  | 283       | 592           |
| 16. | Lengkong    | 272       | 496           |
| 17. | Jatikalen   | 147       | 329           |
| 18. | Gondang     | 125       | 528           |
| 19. | Ngluyu      | 104       | 194           |
| 20. | Rejoso      | 437       | 626           |

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2018

| No. | Kecamatan   | Jumlah | Jumlah Linmas |
|-----|-------------|--------|---------------|
| 1.  | Nganjuk     | 395    | 435           |
| 2.  | Sukomoro    | 284    | 286           |
| 3.  | Bagor       | 532    | 652           |
| 4.  | Wilangan    | 168    | 214           |
| 5.  | Berbek      | 423    | 590           |
| 6.  | Loceret     | 457    | 588           |
| 7.  | Ngetos      | 216    | 254           |
| 8.  | Sawahan     | 342    | 222           |
| 9.  | Pace        | 538    | 429           |
| 10. | Prambon     | 435    | 435           |
| 11. | Tanjunganom | 685    | 521           |
| 12. | Kertosono   | 342    | 285           |
| 13. | Baron       | 289    | 357           |
| 14. | Ngronggot   | 396    | 364           |
| 15. | Patianrowo  | 283    | 342           |
| 16. | Lengkong    | 272    | 231           |
| 17. | Jatikalen   | 147    | 147           |
| 18. | Gondang     | 125    | 335           |
| 19. | Ngluyu      | 104    | 108           |
| 20. | Rejoso      | 437    | 377           |

Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perluadanya pemberdayaan anggota Satlinmas mempunyai kewajiban diantaranya membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertibanmasyarakat luas, maka anggota Satlinmas pun meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas, pemberdayaan tersebut diantaranya :

- Peningkatan peran serta dan prakarsa
- Peningkatan kesiapsiagaan, dan
- Penanganan tanggap darurat

Anggota Linmas dari tahun ke tahun berfluktuasi/ berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Oleh karena pentingnya peran serta satlinmas ikut serta dalam keberhasilan pembangunan maka perlu penyempurnaan keberadaan anggota Linmas di masing-masing desa sejumlah satu pleton ( 31 orang ).

Data penanganan bencana kebakaran 2014 s/d 2018

| No | Penangan Kebakaran |                |          |               |          |               |          |                |          |               |
|----|--------------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|
|    | 2014               |                | 2015     |               | 2016     |               | 2017     |                | 2018     |               |
|    | Kejadian           | Respon<br>time | Kejadian | Respon<br>ime | Kejadian | Respon<br>ime | Kejadian | Respon<br>time | Kejadian | Respon<br>ime |
| 1. | 33                 | 11             | 50       | 20            | 23       | 15            | 30       | 1              | 60       | 32            |

Sesuai laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran selalu bisa tertangani, namun penanganan tersebut belum bisa dilakukan semaksimal mungkin karena ada beberapa kendala diantaranya jarak tempuh antara lokasi kejadian dengan pusat penanganan.

Penanganan kebakaran didukung oleh sejumlah aparatur pemadam kebakaran pada UPT Pemadam Kebakaran sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang dan didukung oleh mobil pemadam kebakaran

sejumlah 4 (empat), 2 (dua) pos pantau kebakaran dan 3 (tiga) buah watertorn.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Nganjuk**

| No | Indikator kinerja sesuai tugas Dan fungsi perangkat Daerah                        | Target SPM atau NSPK                                 | Target IKK   | Target indikator lainnya | Target Restra Perangkat Daerah |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun |      |      |      |      |
|----|---|--|--|--------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
|    |   |  |  |                          | 2014                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                        | 6                              | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                       | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 1  | Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat | Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                          | 57                             | 60   | 60   | 60   | 62   | 55                      | 55   | 56   | 58   | 59   | 96                       | 92   | 93   | 97   | 95   |
| 2  | Terwujudnya Kualitas Penganan bencana Kebakaran                                   | Penanggulangan an Bencana Kebakaran                  | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran                    |                          | -                              | -    | -    | 60   | 65   | -                       | -    | -    | 55   | 60   | -                        | -    | -    | 91   | 92   |



Tabel II.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kabupaten Nganjuk

| No | Uraian   | Anggaran pada Tahun |             |             |             |             | Realisasi Anggaran |             |             |             |             | Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|    |  | 2014                | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014               | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran              | Realisasi |
| 1  | 2  | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                  | 9           | 10          | 11          | 12          | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                    | 19        |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 521.960.200         | 218.035.000 | 512.787.000 | 278.945.000 | 257.097.500 | 437.886.463        | 195.826.940 | 500.855.800 | 234.707.575 | 50.627.989  | 83,9   | 89,8 | 97,7 | 84,1 | 19,7 | 5,88                  | -7,77     |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 308.863.100         | 232.460.000 | 122.400.000 | 318.300.000 | 403.570.000 | 287.443.946        | 229.562.420 | 109.760.739 | 303.525.353 | 36.657.436  | 93,1   | 98,8 | 89,7 | 95,4 | 9,1  | 28,69                 | 4,07      |
| 3. | Program Peningkatan disiplin aparatur  | 302.448.000         | 393.665.000 | 386.385.000 | 286.350.000 | 485.979.000 | 287.678.803        | 386.396.600 | 360.253.700 | 279.893.006 | 162.862.800 | 95,1   | 98,2 | 93,2 | 97,7 | 33,5 | 18,03                 | -9,14     |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 182.058.500         | 218.302.000 | 292.163.000 | 304.200.000 | 291.639.000 | 176.364.926        | 211.201.400 | 283.502.600 | 281.400.479 | 6.550.500   | 96,9   | 96,7 | 97,0 | 92,5 | 2,2  | 13,43                 | -11,11    |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan | 2.500.000           | 6.000.000   | 6.000.000   | 13.000.000  | 16.000.000  | 2.439.000          | 5.943.000   | 5.356.000   | 12.818.000  | -           | 97,6   | 99,1 | 89,3 | 98,6 | 0,0  | 69,94                 | 68,28     |

|    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |        |        |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 6. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan                | 208.537.600 | 526.542.000 | 264.868.000 | 316.700.000 | 230.241.000 | 183.551.660 | 436.417.533 | 252.780.125 | 279.392.637 | 38.258.150 | 83,9 | 82,9 | 95,4 | 88,2 | 16,6 | 69,94  | 4,98   |
| 7. | Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal     | 24.825.000  | 48.804.000  | 48.570.000  | 60.000.000  | 22.869.000  | 21.245.000  | 31.807.112  | 46.225.571  | 35.395.533  | 1.140.000  | 85,6 | 65,2 | 95,2 | 59,0 | 5,0  | 14,44  | -6,29  |
| 8. | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan |             | -           |             | 791.600.000 | 489.431.500 |             | -           |             | 652.266.092 | 73.230.200 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 82,4 | 15,0 | -9,54  | -22,19 |
| 9. | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )       | 535.184.400 | 206.775.000 | 129.888.000 | 165.000.000 | 103.834.000 | 458.089.473 | 158.724.241 | 119.982.283 | 129.961.979 | 10.558.650 | 83,9 | 76,8 | 92,4 | 78,8 | 10,2 | -27,15 | -43,33 |

|    |   |             |             |             |               |               |             |             |             |               |             |      |      |      |      |      |       |        |
|----|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| 10 | Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum             | 149.938.500 | 218.241.000 | 194.720.000 | 255.000.000   | 126.606.000   | 128.411.561 | 183.198.011 | 187.519.600 | 222.522.687   | 13.980.650  | 85,6 | 83,9 | 96,3 | 87,3 | 11,0 | 3,85  | -7,51  |
| 11 | Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat        | -           | -           | -           | 1.718.400.000 | 1.457.898.000 | -           | -           | -           | 1.439.673.426 | 119.910.000 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 83,8 | 8,2  | -3,79 | -22,92 |
| 12 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | -           | -           | -           | 995.010.900   | 688.810.000   | -           | -           | -           | 956.487.133   | 70.223.980  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 96,1 | 10,2 | -7,69 | -23,16 |

#### II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan kabupaten Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, indah dan kondusif diperlukan beberapa langkah-langkah positif. Namun dalam perwujudannya masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tidak semua tantangan itu dianggap sebagai suatu masalah akan tetapi dapat dijadikan sebagai peluang dalam pengembangan pelayanan kedepan.

Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa dijadikan sebagai peluang dalam pengembangan pelayanan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya beban urusan yang semakin berat yaitu ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis daerah kabupaten Nganjuk;
2. Adanya penetapan peruntukan tata ruang yang membutuhkan pengendalian dan pengawasan serta perizinannya berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun . tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
3. Adanya penambangan yang ilegal dan jenis jenis dan tidak memiliki dokumen perijinan yang sah dan benar yang tidak berdasarkan pada penetapan wilayah penambangan;
4. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
5. Belum memiliki Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dalam pelaksanaannya sering ditemui kendala-kendala yang dapat menimbulkan hambatan. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Kurangnya kualitas penanganan bencana kebakaran ;
2. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran dan pematuhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
3. Kurangnya pegesan penerapan saksi terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam operasi penegakan peraturan daerah ,pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat ;

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk melihat kompleksitas permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

#### III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati yang hendak dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu

“(MEWUJUDKAN) KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2018- 2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut terutama di Misi kesatu yaitu “Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban” Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sasaran hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tentram. Berdasarkan sasaran di atas faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah :

- a. Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
- b. Tersedianya dukungan APBD untuk urusan tramtibus;
- c. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan;
- d. Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman tentram dan tertib;
- e. Meningkatnya penataan, penertiban dan penurunan dampak sosial.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Peraturan Daerah dan penciptaan ketentraman dan ketertiban;
2. Kondisi Masyarakat yang mendukung adanya praktek-praktek yang berdampak sosial, untuk kepentingan pribadi;
3. Eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) yang cenderung merusak lingkungan khususnya Tambang Non logam dan Batuan;
4. Ketidapatuhan masyarakat dalam penataan yang bersifat ketertiban umum.

### III.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Prov Jawa Timur

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Salah satu kata kunci dalam visi dimaksud adalah Meningkatkan Pelayanan Publik, yaitu agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah. Untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi diantaranya Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Dan untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, diantaranya “Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan”. Dengan demikian bahwa kondisi dinamis suatu negara dan daerah sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan, yang didukung dengan adanya usaha peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan Visi “Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



serta Perlindungan Masyarakat” yang memprioritaskan dan memfokuskan pembangunan dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menetapkan 6 (enam) misi diantaranya adalah meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur yang diwujudkan melalui strategi optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) di lingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja dan dengan strategi dalam meminimalisir gangguan dan pelanggaran hukum dan sosial secara preventif.

#### III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 ditegaskan bahwa Lingkup muatan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup pengawasan penataan ruang. Dan berdasarkan Pasal 5 huruf i, bahwa pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui ketentuan perizinan dan pengenaan sanksi. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja berperan sangat penting dalam penegakan peraturan daerah berkaitan dengan penertiban, penataan dan pemanfaatan tata ruang dan ijin mendirikan bangunan di kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Kabupaten Nganjuk bahwa penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel,

dan inklusif di semua tingkatan Kabupaten Nganjuk, adalah merupakan suatu dasar perencanaan pembangunan yang terus menerus dilaksanakan.

Dengan tatanan yang sesuai dan kondisi aman, nyaman, tentram dan tertib, maka akan mengurangi indikator kejahatan kekerasan dan pembunuhan sehingga akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di daerah.

Untuk itu adanya perlu upaya-upaya pembangunan I berbagai bidang, diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. Peningkatan sumber Daya Aparatur;
3. Penetapan sistem integrasi data dan informasi berikut pengelolaannya;
4. Peningkatan penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan;
5. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

### III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 adalah Mengembangkan pola kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram. Dalam mewujudkan kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram, dan berdasarkan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui Pamswakarsa ;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada ;
3. Peningkatan penanganan bencana kebakaran;
4. Peningkatan ketenraman ketertiban dan keindahan;

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
6. Peningkatan sumber daya aparatur;
7. Peningkatan penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan;
8. Penetapan sistem integrasi data dan informasi berikut pengelolaannya;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana visi kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho) yang didukung dengan misi yang mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, telah selaras dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Pembangunan yang mengandung makna dinamis dalam mencapai tujuan saat ini perlu lebih memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots), memelihara berbagai keragaman budaya serta menjunjung tinggi kebebasan manusia.

Dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan dimanis perlu adanya dukungan dari berbagai sektor baik peningkatan taraf hidup, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram.

Guna mewujudkan kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram dibutuhkan sasaran strategis yang mendukung. Adapun tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1  
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan  | Indikator                           | Target | Sasaran   | Indikator  | Th.Awal<br>2018 | Target |      |      |      |      |
|---|-------------------------------------|--------|---|--|-----------------|--------|------|------|------|------|
|   |                                     |        |   |  |                 | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya stabilitas Kondisi Sosial Tenram Tertib dan Religius | Prosentase Penurunan Pelanggaran K3 | 100    | Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) | - Presentase Penurunan Pelanggaran K3 yang terselesaikan | 59              | 60     | 60   | 65   | 65   | 70   |
|   |                                     |        | Terwujudnya cakupan pelayanan bencana kebakaran   | - Presentase bencana kebakaran yang tertangani           | 60              | 60     | 65   | 65   | 65   | 75   |

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna terwujudnya sasaran yang diharapkan, maka diperlukan adanya dukungan/strategi dalam pelaksanaannya. Adapun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan  | Sasaran   | Strategi  | Arah kebijakan   |
|---|---|---|--|
| Meningkatnya Stabilitas Kondisi Sosial Tenram Tertib dan Religius | Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mentaati peraturan daerah</li> <li>- Terpenuhinya anggota Linmas dalam setiap desa terdapat 1 ( satu ) Pleton</li> <li>- Peningkatan Pembinaan Linmas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penindakan secara tegas setiap pelanggar peraturan daerah</li> <li>- Penambahan dan Pembinaan anggota Linmas</li> <li>- Pelaksanaan Pamswakarsa</li> </ul> |
|   | Terwujudnya cakupan pelayanan bencana kebakaran   | Melaksanakan pemadaman kebakaran dengan cepat dan tertangani secara maksimal  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan pos pantau di 5 eks wiljatuti</li> </ul> <p>Pembangunan water torn 1 (satu) buah di setiap 3 (tiga) kec. Atau berdasarkan jarak lokasi</p>                  |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mewujudkan kabupaten Nganjuk yang aman, ternteram, tertib, indah dan kondusif, diperlukan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Program dan rencana kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

| Tujuan  | Indikator Tujuan   | Sasaran                    | Indikator Sasaran   | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                              |   |              |           |              |           |              |           |              |           |   |           | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |             |             |      |
|---|--|----------------------------|---|------|----------------------|---|---|--|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|------|
|   |  |                            |   |      |                      |   |   | Tahun-1 2019   |   | Tahun-2 2020 |           | Tahun-3 2021 |           | Tahun-4 2022 |           | Tahun-5 2023 |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra SKPD |           |                                 |        |             |             |      |
|   |  |                            |   |      |                      |   |   | Target   | Rp  | Target       | Rp        | Target       | Rp        | Target       | Rp        | Target       | Rp        | Target  | Rp        |                                 |        |             |             |      |
| (1)   | (2)  | (3)                        | (4)   | (5)  |                      |   |   | (6)  | (7)   | (8)          | (9)       | (10)         | (11)      | (12)         | (13)      | (14)         | (15)      | (16)  | (17)      | (18)                            | (19)   | (20)        | (21)        | (23) |
| Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tertib dan religius | Meningkatnya Kualitas Pelayanan sekretariat dan religius | Meningkatnya pelayanan OPD | Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat daerah | 1    | 05                   | 01  | 01  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah | 65%          | 70%       | 364.441.000  | 75%       | 504.300.000  | 77%       | 541.700.000  | 80%       | 565.800.000                                     | 81%       | 601.000.000                     | 77%    | 587.000.000 | Sekretariat |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 01  | Penyediaan jasa surat menyurat   | Jumlah Penerima Informasi   | 1.000.000    | 100 Orang | 1.500.000    | 125 orang | 2.500.000    | 200 Orang | 3.000.000    | 200 orang | 3.000.000                                       | 200 orang | 3.000.000                       |        | 3.000.000   |             |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya listrik                             | Jumlah bidang yang terlayani  | 5.400.000    | 3 bidang  | 60.000.000   | 3 bidang  | 70.000.000   | 3 bidang  | 75.000.000   | 3 bidang  | 80.000.000                                      | 3 bidang  | 85.000.000                      |        | 85.000.000  |             |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 26  | Pengadaan Peralatan dan alat Pembersih                                     | Jumlah alat kebersihan yang tercukupi   |              | 20 jenis  | 15.000.000   | 20 jenis  | 20.000.000   | 20 jenis  | 20.000.000   | 25 jenis  | 25.000.000                                      | 25 jenis  | 25.000.000                      |        | 25.000.000  |             |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 19  | Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi Teknik /Keamanan Perkantoran | Jumlah petugas kebersihan 2 orang   | -            | -         | 24.000.000   | 2 orang   | 24.000.000   | 2 orang   | 36.000.000   | 2 orang   | 36.000.000                                      | 2 orang   | 48.000.000                      |        | 48.000.000  |             |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 10  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah barang yang digunakan untuk kegiatan                                   | 21.256.500   | 32 macam  | 25.500.000   | 32 macam  | 45.000.000   | 32 macam  | 35.000.000   | 32 macam  | 35.000.000                                      | 32 macam  | 37.500.000                      |        | 37.500.000  |             |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 11  | Penyediaan Barang cetak dan Pengandaan                                     | Jumlah barang yang akan dicetak dan digandakan                                | 5.000.000    | 4 jenis   | 14.000.000   | 8 jenis   | 14.000.000   | 8 jenis   | 14.000.000   | 10 jenis  | 17.500.000                                      | 10 jenis  | 18.000.000                      |        | 18.000.000  |             |      |
|   |  |                            |   | 05   | 01                   | 01  | 12  | Penyediaan komponen  | Jumlah barang yang  | 500.000      | 1         | 500.000      | 1 jenis   | 1.000.000    | 1         | 1.300.000    | 1         | 1.300.000                                       | 1         | 1.500.000                       |        | 1.500.000   |             |      |





|  |  |  |  |    |    |    |    |   |   |             |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                      |                        |                      |             |                    |                    |  |
|--|--|--|--|----|----|----|----|---|---|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
|  |  |  |  | 05 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor        | Jumlah Peralatan kantor yang difasilitasi               | 20.000.000  | 5 jenis                | 20.000.000         | 5 jenis                | 25.000.000         | 5 jenis                | 30.000.000         | 5 jenis                | 32.500.000           | 5 jenis                | 35.000.000           |             | 35.000.000         |                    |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala/kendaraan dinas/operasional    | Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi                | 347.670.000 | 14 roda empat 6 roda 2 | 347.670.000        | 14 roda empat 6 roda 2 | 365.000.000        | 14 roda empat 6 roda 2 | 375.000.000        | 14 roda empat 6 roda 2 | 385.000.000          | 14 roda empat 6 roda 2 | 385.000.000          |             | 385.000.000        |                    |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                    | Jumlah Kendaraan dinas baru                             | -           | -                      | -                  | 5 jenis                | 4.655.000.000      | 5 Jenis                | 4.655.000.000      | 5 jenis                | 4.655.000.000        | 5 jenis                | 4.655.000.000        |             | 4.655.000.000      |                    |  |
|  |  |  |  |    |    |    |    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>              | <b>Tingkat Kehadiran ASN</b>                            | <b>100%</b> | <b>100%</b>            | <b>171.255.000</b> | <b>100%</b>            | <b>922.000.000</b> | <b>100%</b>            | <b>982.000.000</b> | <b>100%</b>            | <b>1.042.000.000</b> | <b>100%</b>            | <b>1.102.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>879.000.000</b> | <b>Sekretariat</b> |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya          | Jumlah Pegawai yang difasilitasi seragam                | 104.784.000 | 232 orang              | 26.950.000         | 232 orang              | 330.000.000        | 232 orang              | 330.000.000        | 232 orang              | 330.000.000          | 232 orang              | 330.000.000          |             | 305.000.000        |                    |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu               | Jumlah anggota Paskibraka yang difasilitasi             | -           |                        | 144.305.000        | 201 Orang              | 180.000.000        | 201 orang              | 190.000.000        | 201 orang              | 200.000.000          | 201 orang              | 210.000.000          |             | 180.000.000        |                    |  |
|  |  |  |  |    |    |    |    | Pelaksanaan Senam Kesegaran jasmani                       | Jumlah Pegawai yang difasilitasi                        | -           | -                      | -                  | 129 Orang              | 12.000.000         | 129 Orang              | 12.000.000         | 129 Orang              | 12.000.000           | 129 Orang              | 12.000.000           |             | 12.000.000         |                    |  |
|  |  |  |  |    |    |    |    | Pengadaan pakaian kerja lapangan                          | Jumlah Pegawai yang difasilitasi pakaian kerja lapangan | -           | -                      | -                  | 10 Set                 | 400.000.000        | 10 Set                 | 450.000.000        | 10 Set                 | 500.000.000          | 10 Set                 | 550.000.000          |             | 400.000.000        |                    |  |
|  |  |  |  | 1  | 05 | 01 | 05 | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> | <b>Rata-rata Nilai SKP ASN</b>                          | <b>70%</b>  | <b>72%</b>             | <b>288.820.000</b> | <b>75%</b>             | <b>899.000.000</b> | <b>75%</b>             | <b>899.000.000</b> | <b>77%</b>             | <b>899.000.000</b>   | <b>79%</b>             | <b>899.000.000</b>   | <b>76%</b>  | <b>899.000.000</b> | <b>Sekretariat</b> |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 03 | 06 | Peningkatan Kemampuan teknis Aparatur                     | Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan        | -           | -                      | -                  | 232 Orang              | 899.000.000        | 232 Orang              | 899.000.000        | 232 Orang              | 899.000.000          | 232 Orang              | 899.000.000          |             | 899.000.000        |                    |  |
|  |  |  |  |    |    |    |    | Pembentukan Pelatihan Paskibraka                          |   |             |                        | 113 orang          |                        | 113 orang          |                        | 113 orang          |                        | 113 orang            |                        | 113 orang            |             | 113 orang          |                    |  |
|  |  |  |  |    |    |    |    | Kesempatan  |   |             |                        | 130 orang          |                        | 130 orang          |                        | 130 orang          |                        | 130 orang            |                        | 130 orang            |             | 130 orang          |                    |  |

|  |  |  |  | 1  | 05 | 01 | 05 | Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Presentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang di Susun Tepat Waktu | 100%       | 100 %     | 6.000.000 | 100 %     | 36.000.000 | 100 %     | 36.000.000 | 100 %     | 36.000.000 | 100 %     | 36.000.000 | 100 % | 36.000.000 | 100 % | 36.000.000 | Sekretariat | Sekretariat |  |
|--|--|--|--|----|----|----|----|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------|-------------|--|
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD             | Jumlah dukumen capaian kinerja yang disusun                               | -          | -         | -         | -         | 3.000.000  | 1 laporan | 3.000.000  | 1 laporan | 3.000.000  | 1 laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 02 | Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran   | Jumlah dukumen keuangan yang disusun                                      | 10.000.000 | 2 Laporan | 4.000.000 | 2 Laporan | 3.000.000  | 2 Laporan | 3.000.000  | 2 Laporan | 3.000.000  | 2 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                  | Jumlah dukumen lap achir tahun dan aset yang tersusun                     | -          |           | -         | -         | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 04 | Penyusunan Pelaporan akhir tahun   | Jumlah Pelaporan Akhir Tahun yang disusun                                 | 3.000.000  | 1 Laporan | 2.000.000 | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 05 | Penyusunan rencana kerja perangkat daerah  | Jumlah rencana kerja yg dikerjakan  | -          | 1 Laporan | -         | 1 laporan | 3.000.000  | 1 laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 06 | Penyusunan renstra perangkat daerah  | Penyusunan Restra yg dikerjakan   | -          | 1 Laporan | -         | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 07 | Penyusunan RKA dan DPA perangkat Daerah  | Jumlah DPA dan RKA yg disusun   | -          | 1 DPA     | -         | 1 DPA     | 3.000.000  | 1 DPA     | 3.000.000  | 1 DPA     | 3.000.000  | 1 DPA     | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 08 | Penyusunan LKjIP perangkat Daerah  | Laporan LKjIP yang tersusun   | -          | 1 Laporan | -         | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 09 | Penyusunan LPPD perangkat Daerah   | Laporan LPPD yang tersusun  | -          | 1 Laporan | -         | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  | 1 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |
|  |  |  |  | 05 | 01 | 06 | 10 | Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan SAKIP yang disusun   | -          | 9 Laporan | -         | 9 Laporan | 3.000.000  | 9 Laporan | 3.000.000  | 9 Laporan | 3.000.000  | 9 Laporan | 3.000.000  |       | 3.000.000  |       |            |             |             |  |

|  |                          |  |  |    |    |    |    |   |   |            |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |     |             |                        |  |
|--|--------------------------|--|--|----|----|----|----|---|---|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----|-------------|------------------------|--|
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 06 | 11 | Penyusunan LKPJ Peringkat daerah  | Laporan LKPJ yang tersusun                  |            | 1<br>Laporan |             | 1<br>Laporan | 3.000.000   | 1<br>Laporan | 3.000.000   | 1<br>Laporan | 3.000.000   | 1<br>Laporan | 3.000.000   |     | 3.000.000   |                        |  |
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 06 | 12 | Pencatatan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah   | Laporan Rekonsiliasi yang tersusun          | -          | 1<br>Laporan | -           | 1<br>Laporan | 3.000.000   | 1<br>Laporan | 3.000.000   | 1<br>Laporan | 3.000.000   | 1<br>Laporan | 3.000.000   |     | 3.000.000   |                        |  |
|  | Penurunan Pelanggaran K3 | Terwujudnya tingkat penyelesaian K3 pelanggaran, ketertiban, ketentraman dan keindahan | Jumlah cakupan penyelesaian trantib yang terselesaikan | 1  | 05 | 01 | 19 | Program Penegakan Perundang-undangan  | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda   | 59%        | 74%          | 163.834.000 | 80%          | 246.000.000 | 80%          | 261.000.000 | 85%          | 275.000.000 | 90%          | 286.000.000 | 82% | 286.000.000 | Bidang Penegakan Perda |  |
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 15 | 11 | Penertiban, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Pengambilan Bahan Galian Mineral non Logam dan batuan | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan | 24.975.000 | 100 %        | 30.000.000  | 100 %        | 30.000.000  | 100 %        | 35.000.000  | 100 %        | 40.000.000  | 100 %        | 40.000.000  |     | 40.000.000  |                        | Bagor, Berbek, Ngetos, Loceret, Pace, Ngronggot, Rejoso, Gondang, Lengkon, Jatikalen, Patianrowo |
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 16 | 06 | Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus  | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan | 22.869.000 | 100 %        | 30.000.000  | 100 %        | 40.000.000  | 100 %        | 40.000.000  | 100 %        | 45.000.000  | 100 %        | 45.000.000  |     | 45.000.000  |                        | Kec. Se Kab. Nganjuk   |
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 20 | 09 | Operasi Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)   | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan | 34.165.000 | 80 %         | 34.165.000  | 85 %         | 60.000.000  | 85 %         | 60.000.000  | 90 %         | 60.000.000  | 90 %         | 60.000.000  |     | 60.000.000  |                        | Guyangan, Kandangan, Kudu, Balongkenci   |
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 20 | 05 | Penertiban Anjal, Gepeng, Pengamen dan Psicotik   | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan | 40.164.000 | 80 %         | 40.164.000  | 85 %         | 80.000.000  | 85 %         | 86.000.000  | 90 %         | 90.000.000  | 90 %         | 96.000.000  |     | 96.000.000  |                        | Sepanjang jln. Nasional, Sepanjang jln Nganjuk, Kec. Tanjunganom, Kec. Prambon, Kec. Baron       |
|  |                          |  |  | 05 | 01 | 20 | 11 | Operasi Penertiban Minuman beralkohol   | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan | 29.505.000 | 80 %         | 29.505.000  | 85 %         | 36.000.000  | 85 %         | 40.000.000  | 90 %         | 40.000.000  | 90 %         | 45.000.000  |     | 45.000.000  |                        | Kec. Se Kab. Nganjuk   |

| Penurunan Pelanggaran K3 | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda | Jumlah cakupan penyelesaian trantib yang terselesaikan | 1  | 05 | 01 | 17 | Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat                            | Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 70%         | 70 %  | 709.822.000   | 75 %  | 755.437.200   | 80 %  | 798.880.920   | 85 %  | 844.369.034   | 85 %  | 891.105.869   | 79% | 891.105.869   | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat   |
|--------------------------|---|--|----|----|----|----|---|--|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|---|---|
|                          |   |  | 05 | 01 | 15 | 12 | Pengawasan dan Penertiban Perizinan Reklame                                   | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan                      | 93.496.000  | 80 %  | 93.446.000    | 80 %  | 102.790.600   | 85 %  | 113.069.660   | 90 %  | 124.376.626   | 95 %  | 136.814.286   |     | 136.814.286   |   | Nganjuk, Loceret, berbek, Tanjunganom, Kertosono, Bagor, Sukomoro, Wilangan, Pace                                     |
|                          |   |  | 05 | 01 | 27 | 03 | Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PK- 5 )                               | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan                      | 50.966.000  | 70 %  | 50.966.000    | 70 %  | 56.062.600    | 75 %  | 61.668.860    | 80 %  | 67.835.746    | 85 %  | 74.619.320    |     | 74.619.320    |   | Nganjuk, Loceret, Berbek, Tanjunganom, Kertosono, Gondang, Bagor, Lengkong, Ngronggot                                 |
|                          |   |  | 05 | 01 | 27 | 05 | Penertiban, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan                      | 22.913.000  | 70 %  | 22.913.000    | 70 %  | 25.204.300    | 75 %  | 27.724.730    | 80 %  | 32.497.205    | 85 %  | 35.546.923    |     | 35.546.923    |   | Nganjuk, Loceret, Pace,, Sukomoro, Kertosono, Berbek, Bagor, Tanjunganom, Jatikalen, Lengkong, Baron, Gondang, Rejoso |
|                          |   |  | 05 | 01 | 27 | 06 | Penertiban, pengawasan bangunan liar  | Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan                      | 18.527.000  | 75 %  | 18.527.000    | 75 %  | 22.379.700    | 80 %  | 27.417.670    | 85 %  | 30.659.457    | 90 %  | 35.125.340    |     | 35.125.340    |   | Nganjuk, Loceret, Sukomoro, Kertosono, Berbek, Tanjunganom, Ngronggot, Bagor, Wilangan                                |
|                          |   |  | 05 | 01 | 15 | 15 | Pengawasan, Pengamanan Pejabat dan Pengendalian Massa                         | Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan                              | 111.770.000 | 100 % | 459.770.000   | 100 % | 474.000.000   | 100 % | 489.000.000   | 100 % | 504.000.000   | 100 % | 519.000.000   |     | 519.000.000   |   | Se Kab Nganjuk  |
|                          |   |  | 05 | 01 | 27 | 01 | Patroli Wilayah   | Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan                         | 34.000.000  | 60 %  | 64.200.000    | 65 %  | 75.000.000    | 70 %  | 80.000.000    | 75 %  | 85.000.000    | 80 %  | 90.000.000    |     | 90.000.000    |   | Se Kab. Nganjuk   |
| Penurunan Pelanggaran K3 | Terwujudnya Keamanan Linmas Lingkungan    | Cakupan pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa           | 05 | 01 | 19 | 11 | Program Perlindungan Masyarakat   | Persentase Pemenuhan Petugas Linmas                              | 92%         | 92%   | 1.862.420.500 | 94%   | 2.063.141.000 | 96%   | 2.848.656.000 | 98%   | 2.461.612.000 | 100%  | 2.700.793.000 | 96% | 2.700.793.000 | Bidang Perlindungan Masyarakat                    | Bidang Perlindungan Masyarakat  |
|                          |   |  | 05 | 01 | 19 | 10 | Pembinaan Linmas dan  | Jumlah Linmas yang   | 396.504.500 | 100 % | 396.504.500   | 100 % | 436.154.000   | 100 % | 479.770.000   | 100 % | 527.747.000   | 100 % | 580.522.000   |     | 580.522.000   |   | Se Kab Nganjuk/20   |

|  |  |   |  |          |           |           |                 |  |   |               |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |   |
|--|--|---|--|----------|-----------|-----------|-----------------|--|---|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|
|  |  |   |  |          |           |           | Siskamswa karsa | dibina   |   |               |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 | Kecamatan            |   |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 19        | 11              | Pembinaan Siskamling   | Jumlah Siskamling yang aktif            | 74.145.000    | 100 %           | 74.145.000           | 100 %           | 100.000.000          | 100 %           | 100.000.000          | 100 %           | 101.881.000          | 100 %           | 112.069.000          |                 | 112.069.000          | Se Kab. Nganjuk                         |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 19        | 18              | Pemberdayaan Anggota Sat Linmas  | Jumlah anggota Linmas yang difasilitasi | 18.782.000    | 60n %           | 101.782.000          | 65 %            | 108.000.000          | 65 %            | 108.000.000          | 70 %            | 115.009.000          | 75 %            | 119.530.000          |                 | 119.530.000          | Se Kab. Nganjuk                         |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 28        | 01              | Penanganan Keamanan Masyarakat   | Jumlah Keamanan yang terselesaikan      | 1.457.898.000 | 100 %           | 1.289.989.000        | 100 %           | 1.418.987.000        | 100 %           | 1.560.886.000        | 100 %           | 1.716.975.000        | 100 %           | 1.888.672.000        |                 | 1.888.672.000        | Se Kab. Nganjuk                         |
|  |  |   |  | <b>1</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>22</b>       | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran</b>                                     | <b>Rata-rata waktu tanggap</b>          | <b>60%</b>    | <b>15 menit</b> | <b>1.336.810.000</b> | <b>15 menit</b> | <b>2.578.910.900</b> | <b>15 menit</b> | <b>2.583.910.900</b> | <b>15 menit</b> | <b>2.838.910.900</b> | <b>15 menit</b> | <b>2.986.910.900</b> | <b>15 menit</b> | <b>2.986.910.900</b> | <b>UPT Pemaam Kebakaran</b>             |
|  |  | <b>Terwujudnya Pelayanan Kebakaran yang Optimal</b> | <b>Jumlah cakupan pelayanan kebakaran yang ditangani</b> |          |           |           |                 |  |   |               |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |   |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 01              | Kesiagaan Pengamanan PMK   | Jumlah Anggota yang menangani Kebakaran | 653.810.000   | 100 %           | 701.810.000          | 100 %           | 876.910.900          | 100 %           | 876.910.900          | 100 %           | 876.910.900          | 100 %           | 876.910.900          |                 | 876.910.900          | Se Kab. Nganjuk                         |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 02              | Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran, Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK | Jumlah alat-alat kebakaran yang terbeli | 25.000.000    | 100 %           | 25.000.000           | 100 %           | 427.000.000          | 100 %           | 427.000.000          | 100 %           | 427.000.000          | 100 %           | 427.000.000          |                 | 427.000.000          | UPT Pemadam Kebakaran                   |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 03              | Pemeliharaan Water Torn  | Jumlah water Torn yang baik             | 5.000.000     | 12 Bulan        | 5.000.000            | 12 Bulan        | 25.000.000           | 12 Bulan        | 30.000.000           | 12 Bulan        | 30.000.000           | 12 Bulan        | 30.000.000           |                 | 30.000.000           | Nganjuk, Lengkon, Warujayeng            |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 04              | Bimbingan Dasar dan Sosialisasi pada Masyarakat  | Jumlah peserta sosialisasi              | 5.000.000     | 1 Kegiatan      | 5.000.000            | 5 Kegiatan      | 50.000.000           | 6 Kegiatan      | 50.000.000           | 7 Kegiatan      | 55.000.000           | 8 Kegiatan      | 60.000.000           |                 | 60.000.000           | Sekolah, Organisasi Wanita kec. Nganjuk |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 05              | Pembangunan Water Torn di dua titik wilayah  | Jumlah water torn yang dibangun         |               | 2 Kcamatan      | 600.000.000          | 1 Kcamatan      | 300.000.000          | 1 Kcamatan      | 300.000.000          | 1 Kcamatan      | 350.000.000          | 1 Kcamatan      | 375.000.000          |                 | 375.000.000          | Berbek, Lengkon, Kertosono, Rejoso      |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 06              | Pemeliharaan Pos Pantau  | Jumlah pos pantau yang akan ditempati   |               |                 |                      | 1 Kcamatan      | 700.000.000          | 1 Kcamatan      | 700.000.000          | 1 Kcamatan      | 900.000.000          | 1 Kcamatan      | 1.000.000.000        |                 | 1.000.000.000        | Berbek, Lengkon, Kertosono, Rejoso      |
|  |  |   |  | 05       | 01        | 33        | 07              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos   | Jumlah Sarana Prasarana yang terpenuhi  |               |                 |                      | 1 Kcamatan      | 200.000.000          | 1 Kcamatan      | 200.000.000          | 1 Kcamatan      | 200.000.000          | 1 Kcamatan      | 200.000.000          |                 | 200.000.000          | Berbek, Lengkon, Kertosono, Rejoso      |

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 diperlukan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun berupa indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci sebagai sebagai alat tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator   |
|----|---|
| 1  | Penurunan Pelanggaran K3 Ketentram Ketertiban dan Keindahan |
| 2  | Rata-rata Waktu Tanggap Bencana ( Resptime )                |

Disamping Indikator Kinerja Utama ditetapkan pula indikator Kinerja Kunci yang merupakan suatu tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan sasaran program atau kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Adapun Indikator Kinerja Kunci tersebut kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel VII.2  
Indikator Kinerja Kunci

| NO | Indikator   |   |
|----|---|---|
| 1  | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraaman, Keindahan)       | $\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Polisi}} \times 100\%$ |
| 2  | Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran | $\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMB yang tertangani dalam Waktu 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$      |

## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap tahunnya. Terwujudnya Rencana Strategis juga bergantung pada kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, koordinasi dan sinergitas organisasi perangkat daerah terkait, serta seluruh komponen masyarakat dan tersedianya anggaran.

Rencana Strategis merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah serta Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Pada akhirnya Rencana Strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan apabila berhasil secara optimal, maka akan terwujud kondisi kabupaten Nganjuk yang aman, terteram, tertib dan indah.



Tabel IV. 1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan   | Indikator  | Data capaian | Target               | Sasaran  | Indikator  | Data               | Target |      |      |      |      | Umit Kerja Pelaksanaan |   |
|----|--|--|--------------|----------------------|--|--|--------------------|--------|------|------|------|------|------------------------|---|
|    |  |  | tahun awal   | Akhir Periode restra |  |  | Capaian tahun awal | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                        | 2023  |
| 1  | 2  | 3  | 4            | 5                    | 6  | 7  | 8                  | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                     | 15  |
| 1  | Meningkatnya stabilitas Kondisi sosial tentram tertib dan religius | Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman tentram tertib dan indah | 59           | 100                  | <p>Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketetapan dan Ketentraman dan Keindahan)</p> <p>Terwujudnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yang di tangani</p> | <p>Presentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan</p> <p>Presentase Penanganan Kebakaran yang di tangani</p> | 59                 | 60     | 60   | 65   | 65   | 65   | 70                     | <p>Satpol PP</p> <p>UPT Pemadam Kebakaran</p> |